

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
BADAN PENYELENGGARA PEMILU *AD HOC*
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019
(Studi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

TESIS

*Diajukan sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas*



**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

ABSTRAK

Nama : Sarwani
Program Studi : Magister Ilmu Politik
Judul : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN BADAN
PENYELENGGARA PEMILU *AD HOC* PADA PEMILIHAN
UMUM SERENTAK 2019 (Studi di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat)

Persoalan uang dalam pemilu menjadi isu yang krusial, karena terwujudnya pemilu yang berintegritas salah satunya ditentukan oleh transparansi dan akuntabilitas keuangan pemilu. Beberapa kajian menemukan bahwa dalam pemilu-pemilu yang sudah diselenggarakan di Indonesia belum menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan anggaran Pemilu Serentak 2019 oleh BPP *Ad Hoc* di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk menganalisis data dilakukan dengan menggunakan konsep akuntabilitas yang dikemukakan Koppell (2005) yang terdiri dari lima dimensi, yakni transparansi (*transparency*), liabilitas (*liability*), kontrol (*controllability*), tanggungjawab (*responsibility*), dan responsivitas (*responsiveness*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada implementasi transparansi meskipun aktivitas pengelolaan anggaran oleh BPP *Ad Hoc* telah dilaksanakan secara terbuka, tetapi informasi yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban anggaran belum sepenuhnya lengkap dan akurat. Pada implementasi tanggungjawab ditemukan banyaknya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak disampaikan dengan tepat waktu. Sedangkan pada implementasi responsivitas, terdapat ketidak-akuratan data/informasi yang disajikan BPP *Ad Hoc* terkait permintaan/kebutuhan KPU, dan kelalaian BPP *Ad Hoc* pada tugas yang harus ditindaklanjuti terkait pengelolaan anggaran. Dengan demikian, implementasi transparansi, tanggungjawab dan responsivitas belum sepenuhnya optimal. Hal ini merupakan konsekuensi dari kompetensi sumberdaya manusia yang belum merata, terbatasnya pelatihan terkait pengelolaan keuangan pemilu, kondisi geografis yang beragam dan kompleksitas pemilu serentak. Lemahnya implementasi ketiga dimensi akuntabilitas di atas tidak terlepas dari implementasi kontrol yang belum sepenuhnya berhasil; dan tidak optimalnya implementasi liabilitas karena tidak adanya pemberian *reward* dan penerapan *punishment* yang dilematis. Untuk itu diperlukan adanya peningkatan kompetensi SDM, peninjauan kembali beban kerja, dan penambahan anggaran transportasi BPP *Ad Hoc* secara proporsional.

Kata kunci: **BPP *Ad Hoc*, transparansi, liabilitas, kontrol, tanggungjawab, responsivitas**

ABSTRACT

Name : Sarwani
Program Study : Master of Political Science
Title : ACCOUNTABILITY OF BUDGET MANAGEMENT OF *AD HOC* ELECTION MANAGEMENT BODY IN THE 2019 SIMULTANEOUS ELECTIONS (Study in West Tanjung Jabung Regency)

The issue of money in elections is a crucial issue, because the realization of elections with integrity is determined by transparency and accountability in election finances. Several studies have found that the elections that have been held in Indonesia have not implemented the principles of transparency and accountability optimally. This study aims to analyze the accountability of budget management for the 2019 Simultaneous Elections by *Ad Hoc* EMB's in Tanjung Jabung Barat Regency. This research is qualitative descriptive with a case study approach. To analyze the data, using the accountability concept proposed by Koppell (2005) which consists of five dimensions, namely transparency, liability, controllability, responsibility, and responsiveness. The results show that in the implementation of transparency, although the budget management activities by *Ad Hoc* EMB's have been carried out openly, the information presented in the budget accountability report is not fully complete and accurate. In the implementation of responsibility, it was found that many accountability reports for the use of the budget were not submitted on time. Meanwhile, in the implementation of responsiveness, there are inaccuracies in the data/information presented by the *Ad Hoc* EMB's related to the KPU's requests/needs, and the negligence of the *Ad Hoc* EMB's in the tasks that must be followed up on budget management. Thus, the implementation of transparency, responsibility and responsiveness is not yet fully optimal. This is a consequence of the unequal competence of human resources, the lack of training related to election finance management, diverse geographical conditions and the complexity of simultaneous elections. Weak implementation of the three dimensions of accountability above cannot be separated from the implementation of controls that have not been fully successful; and the non-optimal implementation of liabilities due to the absence of rewards and the application of punishment which is a dilemma. For this reason, it is necessary to increase HR competencies, review workloads, and increase the *Ad Hoc* EMB's transportation budget proportionally.

Keywords: *Ad Hoc EMB's*, transparency, liability, control, responsibility, responsiveness